

# Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau)

Yasmin Nabila Hakim<sup>1</sup> Syapril Abdullah<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
yasminnabilahakim@student.uir.ac.id syaprilabdullah@soc.uir.ac.id

Received : June 12, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*This research is motivated by waste management issues caused by a lack of public awareness, limited infrastructure, and minimal recycling initiatives, which have the potential to pollute the environment and spread diseases. The purpose of this study is to understand and analyze the performance of waste management at the Environmental Technical Implementation Unit in Mandau District. This is a descriptive study with a qualitative approach. It involves 18 informants, consisting of 3 key informants and 15 supporting informants. Two techniques were used to select the informants for this study: the census technique (saturated sampling) for the Head of the Waste Management Unit, the Environmental Agency, the District, and the Cleaning and Operational Task Force; and purposive sampling for household heads. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the level of waste management at the Waste Management Technical Implementation Unit in Mandau District, Bengkalis Regency, needs significant improvement based on the indicators of Collection, Transportation, and Final Disposal.*

**Keywords:** *Performance, Waste Management, Technical Implementation Unit, Environmental Agency*

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sampah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur, dan minimnya inisiatif daur ulang, yang berpotensi mencemari lingkungan dan menyebarkan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kinerja pengelolaan sampah pada Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Hidup di Kecamatan Mandau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melibatkan 18 informan yang terdiri dari 3 informan kunci dan 15 informan pendukung. Dua teknik yang digunakan untuk memilih informan penelitian ini: teknik sensus (sampling jenuh) untuk Kepala Unit Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten, dan Satgas Kebersihan dan Operasional; dan purposive sampling untuk kepala rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis perlu perbaikan yang signifikan berdasarkan indikator Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan Akhir.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Pengelolaan Sampah, Unit Pelaksanaan Teknis, Dinas Lingkungan Hidup*

## Pendahuluan

Menjaga kebersihan lingkungan memberikan dampak positif terhadap kesehatan lingkungan, yang membuat lingkungan menjadi lebih sehat dan berpengaruh pada kualitas kesehatan. Kesehatan individu akan menjadi optimal jika lingkungan sekitarnya juga baik. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar tidak baik, kesehatan seseorang juga akan menurun. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ditandai dengan kondisi rumah dan area sekitar rumah yang sehat (Heriani et al., 2024).

Menjaga hidup yang bersih dan sehat adalah salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan. Kesehatan merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati kebahagiaan hidup, menjalankan rutinitas, dan beribadah dengan baik. Oleh karena itu, kebersihan dianggap sebagai tanda keimanan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw: "Kebersihan sebagian dari iman." Ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan terlihat dari perhatian Rasulullah saw terhadap kebersihan sekitarnya, misalnya kebersihan jalan. Beliau bahkan memberikan peringatan kepada siapa saja yang membuang benda berbahaya atau kotoran di jalan (Manajah & Kosasih, 2021).

Persoalan kebersihan lingkungan adalah isu jangka panjang yang memerlukan upaya berkelanjutan dan tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan. Keterlambatan dalam menanganinya hanya akan memperberat upaya penanggulangan. Di Indonesia, sampah sering dianggap remeh oleh masyarakat. Seiring bertambahnya populasi setiap tahun, kebutuhan akan barang-barang rumah tangga juga meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan masalah sampah yang signifikan.

Sampah tetap menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang hingga kini belum tertangani dengan efektif, terutama di wilayah perkotaan. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan merusak keindahan lingkungan akibat polusi air, udara, dan peningkatan populasi hama. Akibatnya, area permukiman di sekitar tumpukan sampah menjadi tidak layak huni bagi penduduk setempat (Argatha et al., 2023). Dalam UU No 23 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, terdiri dari zat organik maupun anorganik yang bisa terurai atau tidak bisa terurai, yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Eliza & Evanita, 2023).

Masalah pengelolaan sampah tidak hanya dialami oleh kota-kota besar, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang signifikan. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Mandau, sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Bengkalis, yang saat ini juga menghadapi masalah dalam pengelolaan sampah.

Kecamatan Mandau, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pertumbuhan pesat dalam pembangunan, termasuk fasilitas ekonomi, pendidikan, perkantoran pemerintah, dan sarana olahraga, telah menyebabkan lonjakan populasi yang signifikan di Kecamatan Mandau.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mandau	150.806
2	Pinggir	88.953
3	Bathin Solapan	60.936
4	Talang Muandau	22.740
5	Bukit Baku	20.945
6	Siak Kecil	14.957
7	Bandar Laksamana	24.124
8	Rupat	33.116
9	Rupat Utara	13.783
10	Bengkalis	82.111
11	Bantan	41.472

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Mandau memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 150.806 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Duri dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga banyak sampah menumpuk di sekitar Kota Duri. Namun, sampah di Kecamatan Mandau tidak sepenuhnya terangkut, menyebabkan penumpukan sampah di tepi jalan atau permukiman warga yang menimbulkan bau tidak sedap. UPT Pengelolaan Sampah hanya mengangkut sampah di sekitar jalan protokol atau utama, seperti Jalan Hangtuh dan Jalan Sudirman, serta di sekitar pertokoan dan pasar

**Tabel 2. Rasio Pengangkutan terhadap Volume Timbunan Sampah**

No	Kecamatan	2024	2021	2022	2023
1	Mandau	94.300 ton	103.757 ton	8.427 ton	29.200 ton

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, rasio pengangkutan sampah terhadap timbunan bervariasi setiap tahunnya. Volume sampah tertinggi tercatat pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023. Data harian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7 hingga 8 ton sampah yang ditimbun setiap hari.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 mengenai pengelolaan sampah, yang diatur dalam Pasal 32, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan kebutuhan. Namun, meskipun UPT Pengelolaan Sampah melakukan upaya

bergotong royong dengan masyarakat untuk membersihkan daerah yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan, hal ini tidak berdampak pada penurunan jumlah sampah.

Upaya untuk mengurangi sampah tidak hanya terbatas pada mengendalikan produksi sampah, tetapi juga melibatkan praktik daur ulang dan penggunaan kembali sampah. Namun, hingga saat ini, tidak ada upaya yang diinisiasi oleh masyarakat dalam mengelola sampah, seperti pemilahan sampah untuk didaur ulang. Sampah seringkali hanya dikumpulkan dalam satu tempat tanpa diperhatikan kemungkinan untuk didaur ulang. Di Kecamatan Mandau, masyarakat menggunakan kantong plastik atau keranjang sebagai wadah sampah karena kurangnya fasilitas seperti tempat pembuangan sementara, sehingga sampah seringkali dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.

**Tabel 3. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara**

No	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Jumlah
1	Pasar Mandau Sudirman	1
2	Jalan Rangau	1
3	Wonosobo/Sebanga	1
4	Gereja Hangtuah	1
5	Polsek Mandau	1
6	Tahap Jl 125	1
7	Jalan Suriname	1

Menurut informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, ditemukan bahwa terdapat tujuh lokasi yang berbeda sebagai tempat pembuangan sampah, masing-masing dilengkapi dengan satu tempat sampah. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Pasar Mandau Sudirman, Jalan Rangau, Wonosobo/Sebanga, Gereja Hangtuah, Polsek Mandau, tahap Jalan 125, dan Jalan Suriname. Fakta ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara di lingkungan masyarakat masih kurang.

**Tabel 4. Data UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Armada yang aktif	
	a. Pick up	2
	b. Dump truck	4
	c. Amroll	3
	d. Mobil Coltdiesel	2
	e. Triseda	1
2	Armada yang rusak berat/tidak aktif/mati total	

	a. Pick up	3
	b. Dump truck	3
	c. Amroll	2
	d. Triseda	3

Menurut informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, dari total 23 unit transportasi yang ditempatkan di daerah tersebut, hanya 12 unit yang aktif dalam pengoperasiannya. Keterbatasan jumlah transportasi yang berfungsi mengakibatkan penurunan efisiensi dalam pengangkutan sampah, yang pada akhirnya menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah.

Kekurangan tempat pembuangan sementara (TPS) di sekitar telah menyebabkan akumulasi sampah yang tersebar di berbagai lokasi karena masyarakat terpaksa melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. UPT Pengelolaan Sampah hanya memasang bak container di beberapa titik strategis seperti Mall Duri City, RSUD Duri, Jalan Wonosobo, dan jalur pipa air bersih. Ini membuat masyarakat kebingungan tentang tempat pembuangan sampah yang tepat, sehingga mereka masih mengandalkan sistem pembuangan sampah tradisional seperti pembuangan terbuka, penimbunan sampah, pembakaran, bahkan pembuangan ilegal di lahan kosong. Kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah mendorong masyarakat untuk membuang sampah ke lahan kosong milik orang lain, yang pada akhirnya menciptakan banyak tempat pembuangan sampah ilegal. Pemerintah harus segera bertindak untuk menangani masalah ini, sebab jika tidak, jumlah tempat pembuangan sampah ilegal hendak terus bertambah.

Dampaknya adalah meningkatnya akumulasi sampah di daerah yang seharusnya bebas dari tumpukan sampah, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan juga berkontribusi besar terhadap penumpukan sampah tersebut. Banyak warga yang masih memilih membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan atau di tanah kosong yang tidak dimiliki, menyebabkan polusi lingkungan. Jika masyarakat lebih memperhatikan tempat pembuangan sampah yang tepat, hal ini dapat mengurangi akumulasi sampah yang terjadi.

Berdasarkan data populasi, Kecamatan Mandau memperlihatkan jumlah penduduk tertinggi di antara kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis, mencapai 150.806 jiwa. Pertumbuhan padat penduduk, bersama dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, ikut menyumbang pada peningkatan volume, jenis, dan sifat sampah yang semakin beragam. Dampaknya adalah penimbunan sampah di sekitar Kota Duri, khususnya di area pemukiman, yang tidak sepenuhnya tertangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah. Meskipun upaya telah dilakukan dengan mengangkut sampah di sekitar jalan protokol, pasar, dan titik-titik strategis lainnya, masih ada permukiman yang belum terlayani.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan fenomena dalam penelitian ini sebagai yaitu tingkat kesadaran masyarakat terkait pentingnya manajemen sampah yang efektif masih tergolong rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai konsekuensi negatif dari kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya

menggunakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan oleh pemerintah, Meskipun Terdapat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa lokasi seperti di sekitar Mall Duri City dan RSUD Duri, masih ada kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari solusi alternatif, seperti menggunakan kantong plastik atau keranjang, yang pada akhirnya meningkatkan kecenderungan untuk membuang sampah secara sembarangan.

Dengan keterbatasan fasilitas, masyarakat lebih cenderung mengambil cara yang paling praktis dengan membuang sampah secara sembarangan, bahkan di lokasi yang seharusnya tidak dijadikan tempat pembuangan, seperti lahan kosong, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal. Walaupun upaya-upaya dalam pengelolaan sampah seperti daur ulang dianggap penting dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, partisipasi masyarakat dalam hal ini masih rendah. Kendala-kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya pendekatan edukatif yang efektif mungkin menjadi faktor utama yang menghalangi masyarakat untuk mengadopsi inisiatif tersebut. Keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah tertentu mendorong masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah secara tidak teratur. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit karena tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik menjadi tempat berkembang biak bagi kuman dan penyakit.

Semua peristiwa ini menghasilkan lingkungan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi dapat timbul karena kurangnya kesadaran dan tindakan yang tepat dalam pengelolaan sampah. Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang efektif. Solusi yang ditemukan harus mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan pendekatan edukasi, infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, promosi daur ulang, dan peningkatan aksesibilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di seluruh wilayah.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Informasi utama yang paling sesuai dan relevan mencakup 1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalis, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, dan 1 Camat Mandau. Selain itu, terdapat 6 petugas pengangkut sampah di Kecamatan Mandau dan 9 warga masyarakat dari Kecamatan Mandau yang berperan sebagai informan pendukung dalam penelitian ini. Total keseluruhan informasi utama dan informan pendukung berjumlah 18 orang.

Dua metode digunakan dalam pemilihan informan untuk penelitian ini, yaitu teknik sensus (atau teknik sampling jenuh) yang diterapkan pada informan seperti kepala UPT Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Petugas Pelaksana Urusan Kebersihan dan Operasional. Hal ini dipilih karena jumlah mereka relatif sedikit dan mereka memiliki peran serta tugas yang berbeda namun relevan terkait dengan pengelolaan sampah

di Kecamatan Mandau. Sedangkan, untuk kepala keluarga, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Penulis memilih 9 kepala keluarga yang mewakili setiap kelurahan dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

## **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Damanhuri (2010), proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dari asal sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir atau pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung (door to door) atau secara tidak langsung (melalui penggunaan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Secara Langsung (door to door)**

Menurut respon masyarakat, petugas tidak mengambil sampah secara langsung dari rumah-rumah warga, tetapi hanya mengambil sampah di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Namun, kinerja petugas dianggap masih kurang efektif karena masih banyaknya sampah yang tersebar, termasuk di badan-badan jalan protokol, yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Penyelenggaraan pengumpulan sampah secara individu langsung, yakni dilakukan oleh petugas kebersihan dengan mendatangi setiap sumber sampah (door to door) dan mengangkutnya secara langsung menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Pendekatan individual langsung ini umumnya digunakan untuk melayani sumber sampah yang terletak di sekitar jalan arteri utama dan kolektor utama. Peralatan yang digunakan biasanya adalah truk sampah dengan bak dump.

### **b. Secara Tidak Langsung (Communal)**

Menurut respons masyarakat, petugas pengangkut sampah tidak menerapkan metode tidak langsung, karena mereka tidak mengambil sampah langsung dari rumah-rumah warga, tetapi hanya dari titik kumpul yang telah ditentukan oleh warga. Namun, pelaksanaannya belum optimal, karena masih terdapat banyak sampah yang berserakan di badan jalan, mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Pengumpulan sampah dengan metode individual tidak langsung adalah pendekatan di mana warga atau petugas kebersihan mendatangi setiap sumber sampah (door to door) dan mengangkutnya ke tempat penampungan sementara atau Transfer Depo sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Metode ini difokuskan pada sumber sampah yang berada di setiap jalan arteri sekunder. Peralatan yang digunakan mencakup mobil dump truck dengan bak sampah dan mobil arm roll dengan kapasitas 8 hingga 10 meter kubik.

### **c. Bak komunal**

Menurut petugas pengangkut sampah, proses pengambilan sampah dilakukan secara komunal, di mana petugas mengambil dan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh warga di tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Jumlah bak komunal di Kecamatan Mandau hanya sebanyak 11 unit, sementara kepadatan penduduk di kecamatan Mandau sangat tinggi. Menurut kepala UPT, seharusnya setiap kelurahan di kecamatan Mandau minimal memiliki 2 bak komunal, sehingga dapat berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh petugas.

Pengumpulan sampah melalui metode komunal langsung adalah cara di mana setiap individu penghasil sampah membawa sampah mereka sendiri ke tempat penampungan sementara (TPS) yang telah disiapkan atau langsung ke truk sampah yang datang ke titik pengumpulan, untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Peralatan yang digunakan dalam proses ini adalah mobil arm roll.

Menurut umpan balik masyarakat, terungkap bahwa proses pengangkutan sampah belum optimal, terlihat dari jumlah sampah yang masih berserakan di Kecamatan Mandau secara umum, serta adanya penumpukan sampah di lokasi-lokasi tertentu yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini terjadi karena petugas pengangkut sampah hanya mengambil sampah dari tempat-tempat tertentu saja, sehingga sampah yang ada di luar lokasi yang telah ditentukan tersebut tidak diperhatikan oleh petugas.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat sesuai dengan situasi yang terlihat di lapangan, dimana terdapat penumpukan sampah yang cukup signifikan di berbagai daerah di Kecamatan Mandau, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Keadaan ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga diperlukan tindakan dari UPT Pengelola Sampah dan pemerintah kecamatan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di permukiman masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah juga sangat penting agar dapat mencegah terjadinya penumpukan sampah di lokasi yang tidak sesuai.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jailan Sahil pada tahun 2016 dengan judul "Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa – Dufa Kota Ternate" yang diterbitkan dalam Jurnal BIOeduKasi Vol. 4 No. 2 Maret 2016 (ISSN: 2301-4678). Sahil menemukan bahwa pengumpulan sampah belum optimal, terutama untuk sampah rumah tangga. Pengumpulan sampah hanya dilakukan di daerah permukiman di pinggir jalan yang dilengkapi dengan Tempat Penampungan Sampah (TPS) untuk memudahkan pengangkutan oleh truk sampah. Namun, di daerah permukiman padat yang sulit dijangkau oleh truk sampah atau jauh dari jalur truk sampah, pengumpulan sampah menjadi sulit. Kondisi ini umum terjadi di seluruh daerah permukiman di Kota Ternate, yang memiliki karakteristik geografis pantai dan pegunungan. Penempatan TPS sering menimbulkan kontroversi, karena banyak warga menolak penempatan TPS di depan rumah mereka, bahkan banyak TPS yang dibangun oleh Dinas Kebersihan Kota Ternate akhirnya dibongkar oleh warga. Selain itu, TPS yang tidak tertutup menjadi sumber bau tak sedap dan menjadi sarang penyakit. Keterbatasan jumlah kontainer sampah juga menjadi masalah serius, terutama mengingat volume sampah pasar yang besar. Kekurangan mobil amrol menyebabkan kontainer seringkali terlambat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah juga rendah, terutama karena kurangnya kelembagaan di tingkat masyarakat.

Pengumpulan dan pengangkutan sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013. Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola berbagai jenis kawasan seperti permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya, serta oleh pemerintah kabupaten/kota. Saat proses pengumpulan dilakukan, campuran kembali sampah yang telah dipilah tidak diperbolehkan.

Pengumpulan dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis sampah yang telah dipisahkan dapat dilaksanakan melalui:

1. Penjadwalan pengumpulan yang sesuai dengan klasifikasi sampah yang sudah dipilah dan sumber asal sampah.
2. Penyediaan fasilitas pengumpulan untuk sampah yang telah terpisah.

Pengambilan sampah dari asalnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut

1. Pengambilan sampah menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sampah dikumpulkan dari sumbernya setidaknya setiap dua hari sekali.
  - b. Setiap jenis sampah dimasukkan ke bak masing-masing dalam alat pengumpul atau jadwal pengumpulan diatur sesuai dengan jenis sampah yang telah dipilah.
  - c. Sampah dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPS 3R sesuai dengan jenisnya.
2. Pengambilan sampah menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa pembatas dilakukan sebagai berikut:
  - a. Sampah yang mudah terurai dikumpulkan dari sumbernya setidaknya setiap dua hari sekali, kemudian diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPS 3R.
  - b. Pengumpulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan jenis sampah lainnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari tiga hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh entitas swasta.

Pengumpulan sampah adalah tindakan mengambil sampah dari setiap sumbernya untuk kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara, atau secara langsung ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan tanpa perlu proses perantara (Damanhuri: 2010).

Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan melibatkan pengumpulan sampah dari beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS), kemudian diangkut menggunakan truk sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Setibanya di TPA, sampah-sampah tersebut dibiarkan dan disebar rata menggunakan alat berat, dengan sebagian kecil digunakan untuk pembuatan kompos.

Informasi mengenai jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia di Kecamatan Mandau dapat dipelajari melalui tabel berikut:

No	TPS	Alamat	Jumlah
1	Kawasan Sebangga	Jl. Wonosobo	1
2	Kawasan Pujasera	Jl. Andi Abidin	1
3	Kawasan Pipa Air Bersih	Jl. Pipa Air Bersih 125	1
4	Pasar Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika Mandau	1
5	Pasar Mandau Raya	Jl. Jendral Sudirman	1

Jumlah	5
--------	---

Dari data yang tercantum dalam tabel, terlihat bahwa jumlah wadah penampungan sampah yang tersedia masih terbilang sangat minim. Terutama di Kota Duri, yang memiliki populasi sebesar 248.235 jiwa dan terdiri dari 11 kelurahan atau desa. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, ketersediaan tempat sampah masih jauh dari memadai.

Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat telah mendorong masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan ke lahan kosong yang bukan milik mereka. Akibatnya, banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk membuang sampah rumah tangga mereka. Selain itu, masyarakat juga cenderung menggunakan badan jalan di Kota Duri, seperti Jalan Hangtuh, sebagai tempat pembuangan sampah. Jika tidak ada tindakan yang cepat dari pihak terkait, masalah tempat pembuangan sampah ilegal ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat agar masalah sampah ini dapat diatasi secara efektif.

### Pengangkutan

Menurut penjelasan dari Kepala UPT dan staf pelaksana di UPT pengelola sampah di Kecamatan Mandau, pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan armada pengangkut sampah yang telah disediakan oleh UPT Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau. Armada ini beroperasi sesuai dengan rute yang telah ditetapkan dan dijadwalkan untuk beberapa kali pengangkutan.

Pembuangan sampah secara sembarangan menyebabkan penumpukan sampah di Kota Duri tidak hanya terbatas di badan jalan dan lahan kosong, tetapi juga terjadi di dekat lingkungan pemukiman. Hal ini mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang tinggal di sekitar area penumpukan sampah karena bau busuk yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyediakan armada pengangkut sampah. Berikut adalah jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia di Kota Duri:

**Tabel 4. Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau**

No	Nama dan Jenis Kendaraan	Kapasitas (m <sup>3</sup> )	Kondisi	Jumlah kendaraan
1	Navara (pick up)	-	Baik	1
2	Hilux (pick up)	-	Baik	3
3	Phanter (pick up)	-	Baik	1
4	Toyota Dyna (Dump Truck)	7 m <sup>3</sup>	Baik	4
5	Hyundai (Dump Truck)	7 m <sup>3</sup>	Baik	1
6	Hino (Dump Truck)	7 m <sup>3</sup>	Baik	1

7	Toyota Dyna (Amroll)	5 m <sup>3</sup>	Baik	4
8	Hilux	3 m <sup>3</sup>	Baik	2
9	Triseda (Becak Motor)	1 m <sup>3</sup>	Baik	3
10	Bulldozer	-	Baik	1
	<b>Total</b>			<b>21</b>

Dari data tersebut, terlihat bahwa ada total 21 armada pengangkut sampah yang tersedia dan beroperasi, yang dibagi menjadi beberapa jadwal pengangkutan. Namun, meskipun jumlah armada yang disediakan sudah cukup banyak, tetapi masih belum cukup untuk mengatasi penumpukan sampah di sekitar lingkungan pemukiman di Kota Duri, terutama di tempat-tempat penumpukan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Menurut petugas pengangkut sampah, pengambilan sampah hanya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan dan mengikuti rute yang telah ditetapkan, terutama di sekitar jalan protokol di Kecamatan Mandau. Setelah itu, sampah tersebut diangkut menggunakan kendaraan operasional UPT Pengelolaan Sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Detail mengenai jam kerja dan rute pengumpulan sampah di Kota Duri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Jam Kerja dan Rute Pengangkutan Sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

NO	NAMA PETUGAS	JAM KERJA	RUTE	KETERANGAN
1	Nanang	14.00 Wib	Dari U- Turn masjid Jami' menuju pokok jengkol berputar arah kembali ke U-Turn Jami'	Sampah yang diambil, Trotoar Kiri – Kanan dan Median
2	Andi Putra	16.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga – TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
3	Afrizal	08.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga – TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
4	Deki	12.00 Wib	Dari Pokok Jengkol – Manci – Simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil trotoar dan median kiri
5	Andi	06.00 Wib	Dari U-Turn masjid Jami' menuju pokokjengkol berputa arah menuju TPA	Sampah yang diambil trotoar kiri kanan dan median

6	Alwi	08.00 Wib	Dari pokok jengkol sampai simpang garoga berputar arah menuju pokok jengkol – TPA	Sampah yang diambil trotoar dan median kiri kanan.
---	------	--------------	---	--

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengangkutan sampah di lokasi-lokasi tertentu, terutama di jalan protokol Kota Duri. Seharusnya, peran UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup melibatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti RW dan RT untuk mengatasi permasalahan sampah di sekitar pemukiman warga. Selain itu, diperlukan perencanaan yang lebih baik agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, armada yang disediakan untuk mengangkut sampah di Kecamatan Mandau tergolong memadai, meskipun belum mencukupi untuk mengatasi volume sampah yang ada di wilayah tersebut. Terlebih lagi, UPT pengelola sampah bertanggung jawab atas dua kecamatan, yakni Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan armada pengangkut sampah serta peningkatan jumlah petugas pengangkut sampah baik dari UPT maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Temuan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Muchammad Zamzami Elamin pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Pengelolaan Sampah di Komunitas Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang". Riset tersebut mencatat bahwa penduduk Desa Disanah tidak memiliki wadah sampah pribadi untuk membuang sampah dari rumah mereka setiap hari. Sebagai gantinya, sampah rumah tangga dikumpulkan dalam kantong plastik dan dibuang ke area terdekat di sekitar tambak sebagai tempat pembuangan akhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008, proses pembuangan sampah diawali dengan penempatan sementara di Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Setiap desa atau kelurahan sebaiknya memiliki TPS guna menampung semua sampah yang dihasilkan warganya agar memudahkan proses pengangkutan ke TPA. Namun, di Desa Disanah, keberadaan TPS tidak terwujud. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lahan yang tersedia dan absennya sarana transportasi untuk mengangkut sampah ke TPA. Sebagai akibatnya, warga cenderung membuang sampah di lahan kosong dan melakukan pembakaran.

Di lingkungan Desa Disanah, keadaan lingkungan terlihat tidak terawat dengan banyaknya sampah yang berserakan dan adanya kotoran hewan di sepanjang jalannya, menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang melintas. Terdapat juga penjual makanan yang memiliki hewan peliharaan dan makanan yang dijajakannya tidak ditutup, meningkatkan risiko kontaminasi dari debu atau kotoran hewan. Selain itu, penjual makanan tersebut juga kurang memperhatikan kebersihan.

Banyak dari para penjual makanan di sekitar sana yang membuang bungkus makanan di tempat-tempat sekitar karena kurangnya tempat sampah dan kurangnya kebiasaan mencuci tangan saat melayani pembeli. Meskipun mereka menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kekurangan tempat sampah membuat mereka terbiasa membuang sampah secara sembarangan. Warga Desa tersebut memiliki pemahaman bahwa

sampah harus dibuang pada tempatnya, tetapi mereka tidak memahami pentingnya pemisahan sampah. Selain itu, warga juga kurang memahami cara-cara untuk mengelola sampah selain dari pembuangan dan pembakaran. Rendahnya pemahaman warga tentang pengelolaan sampah disebabkan oleh lokasi yang terpencil dari desa tersebut.

Pengangkutan dan pemindahan sampah merujuk pada serangkaian operasi yang dimulai dari titik terakhir pengumpulan dalam siklus pengumpulan sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau tempat penampungan sementara (TPST) pada pengumpulan dengan metode langsung individu atau dari tempat penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan komunal hingga ke tempat pembuangan atau pengolahan akhir (TPA/TPST). Metode dan peralatan yang digunakan dalam pengangkutan ini bergantung pada pola pengumpulan yang digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013, pengelolaan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten, dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pengelola kebersihan di suatu daerah, entitas bisnis, dan kemitraan, yang bergantung pada struktur organisasi setempat.

Dalam pandangan Damanhuri (2010), pengangkutan sampah merupakan sub-sistem yang bertujuan untuk mengangkut sampah dari lokasi pemindahan atau sumber sampah secara langsung ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pengangkutan sampah adalah bagian krusial dari sistem pengelolaan sampah yang memerlukan perencanaan yang cermat, terutama untuk memaksimalkan efisiensi waktu pengangkutan, terutama jika:

- a. Ada infrastruktur pengelolaan sampah yang cukup besar yang perlu menangani jumlah sampah.
- b. Titik tujuan sampah berada dalam jarak yang cukup jauh.
- c. Infrastruktur pengelolaan merupakan titik pengumpulan sampah dari berbagai wilayah.
- d. Perlu dilakukan perhitungan yang cermat terkait jadwal pengangkutan sampah.
- e. Kendala lalu lintas di jalur menuju titik akhir pengelolaan sampah menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Berikut adalah persyaratan untuk alat pengangkut sampah:

- a. Alat pengangkut sampah harus memiliki penutup, setidaknya dengan jaring.
- b. Ketinggian bak tidak boleh melebihi 1,6 meter.
- c. Disarankan untuk memiliki alat ungkit.
- d. Kapasitas harus disesuaikan dengan kondisi atau kelas jalan yang akan dilalui.
- e. Bak truk atau dasar kontainer sebaiknya dilengkapi dengan sistem pengaman air sampah.

### **Pembuangan Akhir**

Menurut Kepala UPT dan petugas pelaksana urusan di UPT pengelola sampah di Kecamatan Mandau, di wilayah tersebut hanya terdapat satu tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah beroperasi sejak tahun 2002. TPA ini terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai

Kilometer 9 Gang. Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat ini, kondisi TPA tersebut tidak lagi ideal dan diperkirakan hanya dapat berfungsi selama 2,5 tahun ke depan. Meskipun memiliki luas 5 hektar, TPA ini harus menampung sampah dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan.

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zamzami Elamin pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Manajemen Sampah di Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", yang menyatakan bahwa hasil pengamatan menunjukkan bahwa warga Desa Disanah memiliki kesadaran lingkungan yang rendah. Ini tercermin dari kebiasaan mereka dalam membuang sampah, kondisi lingkungan di Desa Disanah, serta pemahaman yang minim dari warga tentang manajemen sampah. Selain itu, terdapat keterbatasan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk menampung sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari.

Kesadaran warga Desa Disanah terhadap kebersihan lingkungan termasuk dalam kategori heteronomous, yang berarti tingkat kepatuhan atau kesadaran didasarkan pada berbagai motivasi, orientasi, atau dasar yang dapat berubah-ubah. Pada tingkat ini, kepatuhan dan kesadaran masih rendah karena mudah dipengaruhi oleh suasana atau keadaan sekitar. Di Desa Disanah, masyarakat masih berada pada tingkat heteronomous karena motivasi atau dorongan untuk menjaga kebersihan lingkungan masih mengikuti yang lain atau kelompok mayoritas, namun sikap terhadap kebersihan lingkungan warga.

Desa Disanah memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal pengelolaan sampah, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang menyebabkan warga kurang terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Menurut seorang warga, pada masa lalu terdapat iuran sebesar Rp. 1.000,- untuk pengelolaan sampah, namun iuran tersebut dihentikan karena tidak ada tempat penampungan sampah, sehingga sampah hanya dibakar dan tidak dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akibatnya, warga tidak lagi membayar iuran tersebut karena mereka dapat membakar sampah sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Warga cenderung mengikuti kebiasaan umum dalam mengelola sampah, sehingga hampir semua warga membakar sampah rumah tangga. Sampah tersebut biasanya dibakar di lahan kosong yang berdekatan dengan rumah jika sudah menumpuk banyak.

Menurut Yuliyani (2013), sikap terhadap kebersihan lingkungan adalah pandangan seseorang terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Individu yang memiliki sikap positif terhadap kebersihan lingkungan akan menganggap kebersihan sebagai hal yang perlu dipertahankan dan diperhatikan. Sementara itu, individu yang memiliki sikap negatif terhadap kebersihan lingkungan cenderung menganggapnya tidak penting dan tidak perlu dijaga. Berdasarkan penelitian ini, warga Desa Disanah menunjukkan sikap positif terhadap kebersihan lingkungan dengan masih melakukan upaya membakar sampah, meskipun pemahaman mengenai pengelolaan sampah secara lebih baik masih belum sepenuhnya tersampaikan.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan bahwa pemerintah Kota Bengkalis mampu mengatur segala aspek terkait pengelolaan sampah. Hal ini tidak hanya mencakup proses pengumpulan dan pembuangan sampah ke TPA, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan pentingnya kesadaran semua pihak, termasuk masyarakat, terhadap masalah sampah ini.

Pemerintah Kota Bengkalis mengharapkan proses pengelolaan sampah rumah tangga yang ideal melibatkan pengangkutan sampah oleh truk ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), di mana sampah tersebut kemudian diolah. Sisa sampah yang tidak dapat diolah di TPS akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk. Namun, alur penanganan sampah yang diinginkan ini belum berjalan secara optimal. Sebagai contoh, di Kecamatan Mandau, masih diperlukan perluasan TPA karena data menunjukkan bahwa Mandau adalah salah satu wilayah penghasil sampah terbesar di Kabupaten Bengkalis, dengan produksi sampah mencapai 258 m<sup>3</sup> per hari.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kurang memadai atau memerlukan perluasan dapat menyebabkan penumpukan sampah yang semakin parah. Hal ini terjadi karena sampah hanya diangkut ke lokasi dan ditumpuk (*open dumping*) tanpa pengelolaan yang baik dan ramah lingkungan. Akibatnya, bau busuk yang menyengat dan kerumunan alat mengganggu lingkungan warga sekitar TPA, yang berdampak negatif pada kesehatan mereka.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, tanggapan dari informan memang mencerminkan kondisi sebenarnya. Masih banyak penumpukan sampah yang terlihat di Kecamatan Mandau, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Situasi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, sehingga diperlukan tindakan dari UPT pengelola sampah maupun pemerintah kecamatan untuk menertibkan sampah-sampah yang berserakan di permukiman masyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengelola sampah agar tidak terjadi penumpukan di tempat yang tidak semestinya. Armada yang tersedia untuk mengangkut sampah di Kecamatan Mandau sudah cukup banyak, tetapi jumlah tersebut belum memadai untuk menangani seluruh sampah di Kecamatan Mandau. Selain itu, UPT pengelola sampah juga menangani dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Oleh karena itu, masih diperlukan penambahan armada dan petugas pengangkut sampah oleh UPT maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Lingkungan yang bersih sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kesadaran masyarakat yang tinggi sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang kurang peduli terhadap hal ini. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap hari. Sampah ini harus segera ditangani dan dikelola dengan baik untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang dapat menyerang masyarakat di sekitarnya.

Sampah adalah sisa penggunaan oleh manusia yang tidak lagi diperlukan. Sampah sering dianggap kotor dan sebagai sumber berbagai penyakit, namun dalam kehidupan sehari-hari, sampah sering diabaikan. Masih banyak orang yang tidak mau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Banyak orang hanya peduli pada kebersihan rumah mereka sendiri dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga sampah dibiarkan berserakan dan menumpuk di lingkungan mereka.

Jika sampah terus dianggap sebagai masalah kecil, kita akan merasakan dampak negatif yang ditimbulkannya. Sampah dapat menyebabkan berbagai kerugian, terutama bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kita tahu bahwa sampah dapat menjadi sumber banyak penyakit, menyebabkan banjir, dan menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan.

Masalah lain dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan peralatan yang menyebabkan sampah tidak terkelola dengan baik, sehingga tumpukan sampah semakin bertambah. Selain peralatan yang kurang memadai, kekurangan lahan juga menjadi kendala, karena lahan yang tersedia untuk tempat pemrosesan akhir sampah dari dua kecamatan di Kota Duri sudah tidak mampu menampung lebih banyak sampah.

Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan di lahan kosong milik orang lain, menyebabkan munculnya banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga mereka. Selain itu, masyarakat juga menggunakan badan jalan di Kota Duri, seperti di Jalan Hangtuh, untuk membuang sampah. Jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, tempat pembuangan sampah ilegal ini akan terus bertambah. Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah tidak hanya berada di badan jalan dan lahan kosong, tetapi juga dekat dengan lingkungan pemukiman, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat sekitar dengan bau busuk yang ditimbulkan.

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup seharusnya bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti RW dan RT untuk menangani masalah sampah yang mencemari lingkungan pemukiman warga. Selain itu, perlu dibuat perencanaan yang lebih baik agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan wewenang yang telah diberikan kepada mereka secara efektif.

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di sekitar daerah pemukiman yang tidak dijangkau oleh petugas kebersihan. Selain itu, UPT tersebut juga telah memberikan peringatan tentang larangan membuang sampah sembarangan, namun peringatan ini tetap tidak diindahkan oleh masyarakat.

Hingga kini, tantangan sampah di Kota Duri masih belum terpecahkan secara efektif. Masalah ini akan terus berlanjut jika tidak ada minat dan kesadaran dari masyarakat untuk memprioritaskan kebersihan lingkungan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, membutuhkan perbaikan yang substansial, terutama pada aspek Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan Akhir. Untuk informasi lebih lanjut, berikut adalah ringkasan kesimpulan dari setiap indikator:

1. Dalam hal pengumpulan, belum mencapai tingkat yang ideal. Bukti terkait masih banyaknya sampah yang tersebar di jalanan dan petugas hanya mengambil sampah sesuai dengan rute yang ditetapkan, tanpa memperhatikan daerah lain. Dampaknya,

sampah menumpuk di wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam rute pengambilan sampah.

2. Dalam aspek pengangkutan, belum tercapai dengan baik. Kendala ini muncul karena keterbatasan jumlah petugas yang bertugas sebagai pengangkut sampah, dan armada yang tersedia belum mencukupi untuk mengangkut seluruh sampah di Kecamatan Mandau.
3. Perihal pembuangan akhir, situasinya masih belum memuaskan. Faktor ini disebabkan oleh keberadaan hanya satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Mandau, yang didirikan pada tahun 2002. TPA tersebut dalam kondisi yang sangat tidak memadai, dan juga menampung sampah dari dua kecamatan, yakni Mandau dan Bathin Solapan.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2023). Analisis Kinerja Organisasi pada Kantor Kecamatan Blora. *Journal of Public and Management Review*, 6(2), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15994>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anisa, Z. R., Murwaningsih, T., & Ninghardjanti, P. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Tata Usaha di SMK Batik 1 Surakarta. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi*, 2(2), 115–127.
- Argatha, S. M., Kariem, M. Q., & Isabella. (2023). Kebijakan Pemerintah pada Pengelolaan Sampah di Kota Palembang. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 13(2), 121–133.
- Dethan, M. A. (2024). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta

Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri

Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.

- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar*

- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian*

*Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Eliza, & Evanita, S. (2023). Strategi Komunikasi Model Pengembangan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12(3), 406–412.
- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.2369>
- Heriani, I., Hamid, A., Megasari, I. D., & Manajah. (2024). Konsep Kesehatan Lingkungan dalam Hukum Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian*, 66–76. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/3750>
- Higau, C. B. H. (2015). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1448–1459.
- Indrawan, M. (2016). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 4(4), 5062–5076.
- Juhji, Wahyudin, W., Muslihah, E., & Suryapermana, N. (2024). Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 111–123.
- Manajah, M., & Kosasih, E. (2021). Design Thinking Kesehatan Lingkungan Inspirasi Hadis Nabi SAW. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 63–70.
- Mekarisce, A. A. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mulyapradana, A., & Lazulfa, A. I. (2023). Tata Kelola Administrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di PT. BAM Kabupaten Tegal. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 1, 14–24.
- Muttaqin, G. F. (2023). Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2), 159–236. <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4255>
- Nahrisah, E., & Imelda, S. (2024). Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 3(3), 40–50. <https://doi.org/10.22331/efisiensi.v10i1.3965>
- Riduan, A. (2021). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

- Septiani, U., Najmi, & Oktavia, R. (2021). Eco Enzyme : Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan. *Jurnal Universitas Muhamadiyah Jakarta*, 02(1), 1–7. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Siagian, P. (2024). *Filsafat Administraasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinambela, L. . (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suawa, P. J., Novie R Pih, & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Suryani, N. K., & John. (2023). *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susana, Tawai, A., & Yusuf, M. (2023). Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. 1–10.
- Sutha, D. W. (2023). *Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Zulkarnain, W., & Sumarsono, R. . (2015). *Manajemen Perkantoran Profesional*. Malang: Gunung Samudera.